

PELAKSANAAN TUGAS DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN  
KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT MISKIN  
DIDESA KUALA KERITANG KECAMATAN KERITANG KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR

Oleh:

**Rina Febriana Sari**  
**Raja Muhammad Amin**  
**Alicia.cute777@gmail.com**

**Abstrak**

The number of poor people in Sub Keritang in the last 3 years has increased, especially for the rural village of Kuala Keritang is the greatest number of poor people. Of the existing conditions in the field the authors find some symptoms or phenomena, among others: the less the maximum Social Service Indragiri Hulu in increasing empowerment of the poor in the village of Kuala Keritang is evident that an increasing number of poor people in this village, the lack of Social Services rehabilitation in providing social welfare services in the village of Kuala Keritang, such as providing job training and skills specific to the field of public / neglected children / orphans / nursing and the absence of the Department of Social descend to the village of Kuala Keritang to do counseling utilization of community economic development and improve participation of the community to participate in activities of social guidance and participate in improving care for poor families, abandoned children.

The purpose of this study is: weeks to investigate and analyze the performance of duties of Social Service social welfare institutional empowerment of the poor in the village of Kuala Keritang Keritang Indragiri Hilir district and to identify and analyze the constraints faced in the implementation of the tasks of Social Service in the empowerment of social welfare institutions the poor in the village of Kuala Keritang Keritang Indragiri Hilir district.

The population in this study were all poor people in the village of Kuala Keritang District Keritang Indragiri Hilir. Dari existing populations in this study were all employees of the Department of Social Welfare, for, Secretary of the Department, Sub-Division, Division Chief, Section Chief. and sampled to be Dept. of Social Key informant. As for the poor people in the village of Kuala Keritang sampled in this study. using accidental sampling technique as much as 50 people.

From the above table it can be seen the results of the research respondents about improving the welfare of the poor by the Department of Social Welfare where most of the respondents to respond well enough on improving the welfare of the poor by the Department of Social Welfare in the village of Kuala Keritang. Peningkatam conducted welfare is expected to improve the lives of the villagers of Kuala Keritang such as venture capital assistance from the UED SP, livestock assistance program.

*Kata Kunci : Dinas Sosial, Kesejahteraan Sosial, dan Desa Kuala Keritang*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Nasional, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, Pemerintah melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dari sabang sampai merauke secara kontinyuitas untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Untuk mencapai pembangunan nasional tersebut, diperlukan adanya aparatur pemerintah dari pusat sampai di tingkat daerah yang memiliki kapasitas dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan otonomi daerah oleh perangkat daerah, maka daerah melaksanakan dan diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah serta proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan dan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Disamping itu penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan serta memperhatikan potensi serta keanekaragaman Daerah. Daerah juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan dan menjalankan pemerintahannya sendiri.

[Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, dijelaskan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.](#)

Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir merupakan perangkat daerah yang mempunyai wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi dan dekonsentrasi (tugas pembantuan) di bidang social. Dinas yang memiliki peranan penting dalam bidang social dan bidang pelayanan serta pemberdayaan social. Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak sekali masyarakat yang perlu ditingkatkan kesejahterannya hal ini disebabkan keterbatasan atau ketidak berdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteran hidupnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir. Tugas pokok pada Dinas Sosial adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan pembantuan di bidang kesejahteran sosial. Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Sosial yang dibuat untuk melaksanakan dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan mengacu pada program yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Untuk melihat program-program kerja yang dilakukan oleh Dinas Sosial berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Tahun 2010 – 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel I.1 : Program Kerja Dinas Sosial Berdasarkan LAKIP Tahun 2010 -2011

No	Program Kerja	Persentase Pencapaian kerja	Keterangan
1.	Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	60%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- -Belum tercapainya peningkatan kemampuan (<i>capacity building</i>) aparat dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS</li> <li>- -Belum berjalannya pelatihan keterampilan usaha bagi fakir miskin</li> <li>- -Belum terlaksananya fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin</li> <li>- -Belum terealisasinya pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin.</li> </ul>
2.	Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- -Belum berjalannya pengembangan tentang akses sarana dan prasaran bagi penyandang cacat dan lansia</li> <li>- -Masih belum maksimalnya pemberian pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak</li> <li>- -Belum berjalannya pemberian pelatihan keterampilan bagi anak terlantar, anak cacat.</li> <li>- -Belum dibentuknya pusat informasi penyandang cacat dan trauma centre</li> </ul>
3.	Pembinaan anak terlantar	65%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- -Belum tersedianya bangunan tempat penampungan anak terlantar</li> <li>- -Belum terlaksananya pengembangan bakat dan keterampilan bagi anak terlantar</li> </ul>
4.	Pembinaan panti asuhan/panti jompo	65%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- -Masih banyak bangunan panti asuhan/jompo yang belum ter rehabilitasi</li> <li>- -Masih belum terlaksananya pemberian pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo</li> <li>- -Belum maksimalnya pemberian peningkatan keterampilan tenaga pelatih/pendidik.</li> <li>- -Belum terlaksananya peningkatan peran masyarakat secara aktif dalam dunia</li> </ul>
	Pemberdayaan		

5.	Kelembagaan sosial	55%	usaha - -Masih belum berjalannya peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan sosial masyarakat
----	--------------------	-----	--

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, 2013

Dari tabel di atas dapat dilihat beberapa program kerja yang ditetapkan oleh Dinas Sosial berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2010 - 2011, program yang ditetapkan menunjukkan indikasi masih belum terlaksana dengan maksimal.

Dari kondisi yang ada di lapangan penulis menemukan beberapa gejala atau fenomena yang ada antara lain :

- a. Kurang maksimalnya pihak Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin di Desa Kuala Keritang ini dibuktikan dimana terjadinya peningkatan jumlah masyarakat miskin di Desa ini.
- b. Kurangnya pihak Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan rehabilitas kesejahteraan sosial di Desa Kuala Keritang, seperti memberikan latihan kerja dan ketrampilan bidang tertentu bagi masyarakat/anak terlantar/anak panti asuhan/jompo
- c. Tidak adanya pihak Dinas Sosial turun ke Desa Kuala Keritang untuk melakukan penyuluhan pemanfaatan peningkatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan bimbingan sosial serta berpartisipasi dalam meningkatkan pelayanan bagi keluarga miskin, anak terlantar.

## B. Perumusan Masalah

Sukses tidaknya pembangunan itu tergantung pada keikutsertaan masyarakat itu sendiri dalam pelaksanaan pembangunan baik itu dukungan moril maupun spiritual yang diberikan oleh masyarakat. Dengan demikian kepala desa harus memperhatikan apa yang menyebabkan masyarakat kurang berpartisipasi dalam hal pembangunan.

Dinas Sosial merupakan salah satu dinas yang memiliki tugas dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat miskin yang saat ini jumlahnya mengalami peningkatan. Upaya kemandirian ini sangat diperlukan dalam mencapai tujuan pembangunan. Bagaimana mungkin masyarakat akan berpartisipasi dalam pembangunan ketika masyarakat tidak berdaya dan diikutsertakan. Disamping itu juga tujuan pembangunan yang hakiki adalah menciptakan swadaya masyarakat, dimana masyarakat bisa menjadi subjek pembangunan. Dan tujuan mengkoordinir adalah untuk mendorong kelancaran berbagai kegiatan ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan diatas maka selanjutnya penulis merumuskan permasalahan yang di hadapi yaitu : **"Bagaimanakah Pelaksanaan tugas Dinas Sosial dalam pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial masyarakat miskin di Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir"?**

### **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tugas Dinas Sosial pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social masyarakat miskin di Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Dinas Sosial dalam pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial masyarakat miskin di Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan, terutama kepada Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Bahan informasi bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan masalah penelitian ini dan bahan perbandingan dengan masalah penelitian yang bersamaan dengan penelitian ini.

### **D. Pembahasan**

Konsep pemberdayaan telah merubah konsep pembangunan dan sekaligus strategi bagaimana mengentaskan kemiskinan khususnya di pedesaan. Perubahan ini sering disebut orang sebagai perubahan paradigma atau serangkaian perubahan mulai dari tatanan konsep, teori, nilai-nilai, metodologi sampai pada tatanan pelaksanaan. Kebijakan pembangunan selama ini belum mampu secara baik mengatasi kemiskinan dimana kemiskinan terus menjadi permasalahan pokok sepanjang sejarah Negara Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka, sejarah sebuah negara yang salah memandang dan mengurus kemiskinan. Dalam negara yang salah urus, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain masalah kemiskinan.

#### **1. Bantuan dana sebagai modal usaha**

Salah satu aspek positif dari era otonomi saat ini selain pemerintah daerah yang diberikan kewenangan dalam mengurus dan membangun daerahnya masing-masing, pedesaan juga diberikan kesempatan yang sama untuk mengurus dan membangun daerahnya atau lebih dikenal dengan otonomi desa dengan tujuan agar desa tersebut lebih cepat berkembang dan meju. Dalam rangka percepatan kemajuan desa tersebut pemerintah daerah kabupaten telah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk dikelola oleh aparat desa bersama masyarakat untuk mendanai program-program kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Kuala Keritang pihak Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir memberikan alokasi dana sebagai bentuk permodalan yang diberikan bagi masyarakat miskin yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Dengan alokasi dana permodalan tersebut pihak Dinas Sosial dapat menciptakan suatu program ekonomi masyarakat dengan mengelola dana yang diberikan seperti Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Dengan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ini diharapkan mampu mendongkrak ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat miskin. Sehingga dengan program ini masyarakat miskin akan terbantu dengan permodalan yang kondusif yang mungkin selama ini sedikit sulit diperoleh melalui lembaga perbankan.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang bantuan dana sebagai modal usaha dapat dilihat pada table tanggapan responden berikut ini :

Tabel I .1 : Tanggapan Responden Berdasarkan Bantuan Dana Sebagai Modal Usaha

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1.	Baik	18	32,14
2.	Cukup baik	26	46,42
3.	Kurang baik	12	21,44
Jumlah		56	100,00

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden penelitian tentang bantuan dana yang diberikan Dinas Sosial merupakan modal usaha yang diberikan bagi masyarakat miskin dimana untuk tanggapan baik dinyatakan oleh 18 orang responden atau 32,14% alasan responden memberikan tanggapan ini karena pihak memberikan bantuan dana seperti UED atau dana hibah sebagai bentuk permodalan yang diberikan bagi masyarakat miskin.

Selanjutnya untuk tanggapan cukup baik dinyatakan oleh 26 orang responden atau 46,42% alasan responden memberikan tanggapan ini karena dana yang diberikan belum mampu memenuhi permodalan yang dapat dipergunakan untuk usaha oleh masyarakat miskin.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Fahri Jauhari selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial tanggal 27/3/2013 menyatakan bahwa:

*“Pihak Dinas sosial berupaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin dengan memberikan bantuan-bantuan dana yang dipergunakan untuk usaha guna meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat miskin di Desa Kuala Keritang.*

Kemudian untuk tanggapan kurang baik ditanggapi 12 orang responden atau 21,44% alasan responden memberikan tanggapan ini karena bantuan yang diberikan belum mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin secara keseluruhan.

Dari hasil wawancara dengan Salah seorang masyarakat miskin, menyatakan bahwa:

*“Bantuan dana yang di berikan pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar kepada masyarakat miskin sejauh ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang ada selain*

*keterbatasan dana yang ada juga disebabkan masyarakat miskin terutama di Kecamatan Siak Hulu jumlahnya sangat banyak”.*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan cukup baik, disini responden menilai bahwa bantuan modal yang diberikan kepada masyarakat miskin merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, walaupun pemberian bantuan tersebut masih belum maksimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin .

## **2. Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan social ekonomi rakyat**

Selain sebagai bentuk usaha yang membantu masyarakat miskin di Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang, pihak Dinas Sosial melakukan pembangunan beberapa sarana untuk mendukung pengembangan social ekonomi masyarakat seperti KUD dan kegiatan kewirausahaan lainnya. Dengan pengembangan kegiatan social ekonomi rakyat tersebut diharapkan dapat meningkatkan kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat miskin.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan social ekonomi rakyat dapat dilihat pada table tanggapan responden berikut ini :

Tabel I .2 : Tanggapan Responden Berdasarkan Pembangunan Prasarana Sebagai pendukung Pengembangan Kegiatan Sosial ekonomi Rakyat

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1.	Baik	20	35,71
2.	Cukup baik	27	48,21
3.	Kurang baik	9	16,08
Jumlah		56	100,00

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden penelitian tentang pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan social ekonomi rakyat oleh Dinas Sosial dimana untuk tanggapan baik dinyatakan oleh 20 orang responden atau 35,71% alasan responden memberikan tanggapan ini karena terdapat sarana perekonomian yang dapat dipergunakan oleh masyarakat miskin.

Selanjutnya untuk tanggapan cukup baik dinyatakan oleh 27 orang responden atau 48,21% alasan responden memberikan tanggapan ini karena masih sedikitnya kegiatan kewirausahaan yang dilakukan oleh masyarakat miskin di Desa Kuala Keritang.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj Asbety selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial tanggal 28/03/2013 menyatakan bahwa:

*“Salah satu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin adalah dengan mendirikan beberapa sarana perekonomian sebagai tempat masyarakat miskin melakukan kegiatan pemberdayaan, salah satunya*

*adalah dengan mendirikan usaha kecil atau kewirausahaan sehingga masyarakat miskin memiliki pekerjaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.*

Kemudian untuk tanggapan kurang baik ditanggapi 9 orang responden atau 16,08% alasan responden memberikan tanggapan ini karena kewirausahaan yang dilakukan belum digalakkan secara maksimal yang disebabkan keterbatasan modal dan upaya pemasaran produk yang dihasilkan.

Dari hasil wawancara dengan Salah seorang masyarakat miskin, menyatakan bahwa:

*“Kegiatan kewirausahaan yang dilakukan oleh masyarakat miskin sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan sosial belum berjalan maksimal hal ini disebabkan banyak masyarakat yang belum memiliki keterampilan kerja dan adanya keterbatasan modal untuk meningkatkan usaha yang digeluti”.*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan cukup baik, disini responden menilai bahwa pembangunan prasarana perekonomian untuk mendukung peningkatan pengembangan social ekonomi rakyat memerlukan perhatian penuh dari pihak Dinas Sosial seperti memberikan bantuan dana atau bantuan pemasaran hasil produksi .

### **3. Penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa masyarakat**

Selain itu salah satu upaya yang dilakukan dalam menanggulangi pemasaran dari kegiatan perekonomian yang dilakukan adalah dengan menumbuhkembangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan melakukan kerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan pemasaran hasil produk yang dihasilkan.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa masyarakat dapat dilihat pada table tanggapan responden berikut ini :

Tabel I.3 : Tanggapan Responden Berdasarkan Penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1.	Baik	19	33,92
2.	Cukup baik	25	44,64
3.	Kurang baik	12	21,42
Jumlah		56	100,00

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden penelitian tentang penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa masyarakat oleh Dinas Sosial dimana untuk tanggapan baik dinyatakan



oleh 19 orang responden atau 33,92% alasan responden memberikan tanggapan ini karena terdapat sarana KUD untuk memasarkan hasil produksi.

Selanjutnya untuk tanggapan cukup baik dinyatakan oleh 25 orang responden atau 44,64% alasan responden memberikan tanggapan ini karena masih sedikitnya kegiatan kewirausahaan yang dilakukan oleh masyarakat miskin di Desa Kuala Keritang.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. Adrias selaku Kepala Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan Sosial tanggal 29/03/2013 menyatakan bahwa:

*“Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin pihak Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial memberikan dukungan dengan ikut membantu memasarkan hasil produksi yang dihasilkan dengan melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memasakan hasil produksi yang dihasilkan.*

Kemudian untuk tanggapan kurang baik ditanggapi 12 orang responden atau 21,42% alasan responden memberikan tanggapan ini karena kurangnya dukungan yang diberikan Dinas Sosial kepada masyarakat miskin dalam memasarkan hasil produksi.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahawa sebagian besar responden memberikan tanggapan cukup baik, disini responden menilai bahwa dukungan dari Dinas Sosial bagi masyarakat miskin sudah dilakukan namun belum maksimal .

#### **4. Pelatihan bagi aparat dan masyarakat**

Pelatihan yang diberikan adalah pembinaan keterampilan ini adalah berupa pendidikan dan latihan di dalamnya mencakup keterampilan membuat barang, keterampilan mempergunakan mesin peralatan dan pengetahuan komposisi bahan atas usaha yang dilakukan. Tujuan diadakannya pelatihan ini adalah secara teoritis maupun praktis agar masyarakat mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik, sesuai target hasil yang akan dicapai .

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang pelatihan bagi aparat dan masyarakat dapat dilihat pada table tanggapan responden berikut ini :

Tabel I.4 : Tanggapan Responden Berdasarkan Pelatihan bagi Aparat dan Masyarakat

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1.	Baik	17	30,35
2.	Cukup baik	24	42,85
3.	Kurang baik	15	26,80
Jumlah		56	100,00

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden penelitian tentang pelatihan bagi aparat dan masyarakat oleh Dinas Sosial dimana untuk tanggapan baik dinyatakan oleh 17 orang responden atau 30,35% alasan

responden memberikan tanggapan ini karena pelatihan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kerja.

Selanjutnya untuk tanggapan cukup baik dinyatakan oleh 24 orang responden atau 42,85% alasan responden memberikan tanggapan ini karena pelatihan yang diberikan masih jarang dilakukan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Drs Suhaimi Eka selaku Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial tanggal 29/03/2013 menyatakan bahwa:

*“Pelatihan yang diberikan bagi masyarakat yang menjalankan kewirausahaan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kerja dan kemampuan kerja sehingga kegiatan yang dilakukan dapat mencapai hasil yang maksimal.*

Kemudian untuk tanggapan kurang baik ditanggapi 15 orang responden atau 26,80% alasan responden memberikan tanggapan ini karena pelatihan yang dilakukan masih sulit dilakukan hal ini disebabkan karena keterbatasan dana atau anggaran yang dimiliki untuk melakukan pelatihan.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan cukup baik, disini responden menilai bahwa pelatihan bagi aparat dan masyarakat perlu ditingkatkan agar keterampilan kerja dan kemampuan kerja dapat berjalan maksimal.

## **5. Penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat**

Kemiskinan telah membuat masyarakat tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan, tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan public, kurangnya ketersediaan lapangan kerja, jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi kekota dan yang lebih parah lagi adalah kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup, mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan bagi tengkulak lokal dan menerima upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan. Masyarakat miskin bekerja sepanjang hari, tetapi mereka menerima upah yang sedikit.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang penguatan kelembagaan social bagi masyarakat dapat dilihat pada table tanggapan responden berikut ini :

Tabel 1.5 : Tanggapan Responden Berdasarkan Penguatan kelembagaan Sosial Bagi Masyarakat

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1.	Baik	16	28,58
2.	Cukup baik	26	46,42
3.	Kurang baik	14	25,00
Jumlah		56	100,00

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden penelitian tentang penguatan kelembagaan social bagi masyarakat oleh Dinas Sosial dimana untuk tanggapan baik dinyatakan oleh 16 orang responden atau 28,58% alasan responden memberikan tanggapan ini karena terdapat dukungan dari beberapa lembaga atas kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin.

Selanjutnya untuk tanggapan cukup baik dinyatakan oleh 26 orang responden atau 46,42% alasan responden memberikan tanggapan ini karena dukungan yang diberikan belum mampu meningkatkan pemberdayaan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. Suhaimi Eka selaku Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial tanggal 29/03/2013 menyatakan bahwa:

*“Untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin khususnya di Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang setiap pihak terutama kelembagaan sosial yang ada harus saling berkoordinasi untuk memberikan dukungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin”.*

Kemudian untuk tanggapan kurang baik ditanggapi 14 orang responden atau 25,00% alasan responden memberikan tanggapan ini karena lembaga social yang ada jumlahnya masih sedikit dan peranannya masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan berikut akan penulis sajikan rekapitulasi dari hasil penelitian pada table berikut ini :

Tabel I.6 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Tugas Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang baik	
1.	Bantuan dana sebagai modal usaha	18	26	12	56
2.	Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan social ekonomi rakyat	20	27	9	56
3.	Penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa masyarakat	19	25	12	56
		17	24	15	56
4.	Pelatihan bagi aparat dan masyarakat	16	26	14	56
5.	Penguatan kelembagaan social ekonomi masyarakat				
Jumlah		90	128	62	280
Rata-rata		18	26	12	56
Persentase		32,14	46,42	21,24	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden penelitian tentang program pemberdayaan masyarakat miskin oleh Dinas Sosial dimana untuk tanggapan baik dinyatakan oleh 18 orang responden atau 32,14%, tanggapan cukup baik ditanggapi sebanyak 26 orang atau 46,42% dan tanggapan kurang baik ditanggapi sebanyak 12 orang atau 21,24%.

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian responden memberikan tanggapan cukup baik atas peningkatan kesejahteraan yang dilakukan pihak Dinas Sosial di Desa Kuala Keritang. Peningkatan kesejahteraan yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Desa Kuala Keritang seperti bantuan modal usaha dari UED SP, bantuan ternak sapi dari program KUBE.

### **Hambatan-hambatan Tugas Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin**

Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat pelaksanaan tugas Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin adalah :

1. Rendahnya pendidikan khususnya pendidikan formal para masyarakat miskin yang berdampak kepada rendahnya pula kemampuan manajerial masyarakat miskin tersebut, sehingga pelatihan dan pendidikan yang telah dilakukan kurang terserap secara optimal.
2. Selain itu masyarakat miskin tidak mempunyai perencanaan produksi baik itu target produksi maupun sasaran usaha serta aspek manajerial khususnya dalam penanganan administrasi usaha. Oleh sebab itu pelatihan kerja dan keterampilan yang telah dilaksanakan belum dapat menghasilkan prestasi yang diharapkan
3. Lemahnya permodalan juga merupakan factor penghambat dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin namun hal tersebut telah dicari jalan keluarnya oleh Dinas Sosial dan tenaga Kerja melalui bantuan UED dan dana hibah.
4. Dalam hal pemasaran, daya serap pasar local pun menjadi terbatas pula selain itu sikap mental masyarakat miskin juga menjadi kendala dalam hal pemasaran produk-produk daerah karena masyarakat luas lebih menghargai produk-produk dari luar daerah/impor daripada produk sendiri.

## **E. Kesimpulan dan Saran**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab terdahulu maka diakhir penulisan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari tabel diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden penelitian tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin oleh Dinas Sosial dimana sebagian besar responden memberikan tanggapan cukup baik atas peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin oleh Dinas Sosial di Desa Kuala Keritang. Peningkatan kesejahteraan yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Desa Kuala Keritang seperti bantuan modal usaha dari UED SP, program bantuan ternak sapi.

2. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin adalah :
  - Rendahnya pendidikan khususnya pendidikan formal para masyarakat miskin yang berdampak kepada rendahnya pula kemampuan manajerial masyarakat miskin tersebut karena sebagian besar masyarakat masih berpendidikan SD, SLTP.
  - Lemahnya permodalan juga merupakan faktor penghambat dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin, permodalan masih bersumber dari UEDSP atau dana Hibah desa.
  - Dalam hal pemasaran, daya serap pasar local pun menjadi terbatas pula selain itu sikap mental masyarakat miskin juga menjadi kendala dalam hal pemasaran produk-produk daerah

## **2. Saran-Saran**

1. Agar program pemberdayaan untuk dimasa-masa akan datang tetap dilanjutkan terutama dari segi pelatihan pemasaran, pelatihan modal kerja, dan pelatihan keterampilan. Materi pelatihan tersebut sangat dibutuhkan dan pendekatan yang lebih intensif untuk tujuan pelatihan tersebut.
2. Hendaknya para masyarakat miskin tersebut dalam mengelola usahanya lebih professional,. Dimana setiap pelaksanaan kegiatan usaha yang dijalankan diusahakan agar pengusaha industri kecil terlibat secara aktif di dalamnya.
3. Hendaknya setelah memberikan pelatihan, Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir dapat memonitor setiap perkembangan yang terjadi pada para masyarakat dalam hal mengelola usahanya. Pemantauan ini dilakukan dengan jalan mengunjungi langsung lokasi usaha sehingga dapat diketahui sejauh mana pembinaan yang diberikan dapat diserap oleh masyarakat miskin dalam meningkatkan sumber daya manusia masyarakat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Suryaningrat, 1992, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Jakarta, Bumi Aksara
- Gibson, Ivanicevich, Donnelly, 1997, *Organisasi ; Perilaku, Struktur dan Proses*, Jakarta, Bina Rupa Aksara
- Kaho, 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta
- Kumorotomo, Wahyudi, 2002, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers
- Musthopadijaya AR, 2003, *Sistem Negara Republik Indonesia*, LAN, Jakarta
- Ndaraha, Taliziduhu, 1985, *Peranan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan*, Jakarta, Yayasan Dharma IIP
- Nugroho D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta. Gramedia.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Manajemen Pemberdayaan ; Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayan Masyarakat*, Jakarta, Elex Media Komputindo
- Osborne, Davids dan Plastrik, Peter, 2000, *Memangkas Birokrasi ; Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*, Jakarta, Lembaga Manajemen PPM
- Sondang. P. Siagian, 2000, *Patologi Birokrasi ; Analisis, Identifikasi dan Terapinya*, Jakarta, Ghala Media
- Susanto, 1979, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Syafiie, K. I, 2003. *Metodelogi Pemerintahan*. (Edisi Revisi). Bandung, Mandar Maju.
- Thoha, Miftah, 2005, *Manajemen Kepegawaian sipil di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Grup
- Tjikroanidjodjo, Bintoro dan Mustapadijaya AR, 1988, *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan, Perkembangan Teori Dan Harapan*, Jakarta, Penerbit Liberty
- Wasistiono, Sadu, 2003, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung, Fokus Media

Widjaja. 2003, *Pemerintah Desa/Marga (Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah) Suatu Telaah Administrasi Negara*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

\_\_\_\_\_, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah beserta Penjelasannya

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah beserta Penjelasannya

Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir 2011